

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Tasikmalaya

Zaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak telah dijalankan oleh suatu badan yang bernama *De Inspectie Van Finantien* yaitu suatu badan yang mengurus soal pemungutan pajak dari rakyat berdasarkan Undang – Undang Kolonial Belanda. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka terjadilah perpindahan kekuasaan dan De Inspectie Van Finantien diganti oleh suatu badan yang disebut Zaimuba yaitu suatu badan di bawah pengawasan pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan dan pada waktu itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka Zaimuba diganti menjadi Badan Inspeksi Keuangan. Pada saat itu Badan Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar.

Pada tahun 1967, Inspeksi Pajak Bandung menjadi Inspeksi Pajak Bandung dan Inspeksi Pajak Tasikmalaya, yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Banjar serta berkedudukan

di Tasikmalaya. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK/1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994, maka di wilayah Tasikmalaya terdapat KPP Tasikmalaya, KPPBB Tasikmalaya, dan KPPBB Garut. Dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004 mengenai pemecahan wilayah kerja KPPBB Tasikmalaya menjadi KPPBB Tasikmalaya dengan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan KPPBB Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 terdapat penggabungan fungsi atas KPP Tasikmalaya dan KPPBB Tasikmalaya yakni menjadi KPP Pratama Tasikmalaya.

KPP Pratama dibentuk dengan ‘meleburkan’ tiga jenis kantor pelayanan yang ada selama ini yakni, KPP, KPPBB dan Karikpa. Meskipun terdapat penggabungan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kantor – kantor tersebut tetap ada, melalui struktur baru pada KPP Pratama yang berbasis fungsi. Fungsi – fungsi yang dimaksud antara lain meliputi fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan dan Konsultasi yang memperkenalkan Account Representative (AR), fungsi Penagihan, Pemeriksaan, Ekstensifikasi dan terakhir Pengolahan Data dan Informasi.

Perubahan struktur tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Selama ini, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus berurusan dengan minimal 3 (tiga) kantor dengan beberapa seksi berbeda di dalamnya. Sebagai ilustrasi, ketika seorang Wajib Pajak akan melaporkan pembayaran PBB, maka Wajib Pajak tersebut harus mendatangi KPPBB. Sementara untuk urusan PPh dan PPN, maka Wajib Pajak tersebut harus pergi ke KPP yang letaknya berbeda dengan KPPBB. Jika suatu saat Wajib Pajak tersebut diperiksa, maka kantor yang menangani adalah Karikpa yang merupakan unit kantor tersendiri dan terpisah dari KPP maupun KPPBB.

3.1.2. Visi Misi KPP Pratama Tasikmalaya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya memiliki visi dan misi, antara lain:

1. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang unggul dalam layanan dan kinerja, guna memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2. Misi

Menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menerapkan nilai – nilai kementerian keuangan dan memberikan edukasi serta asistensi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3.1.3. Statement Budaya Perusahaan

Statement budaya perusahaan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral.
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber : KPP Pratama Tasikmalaya

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPP Ptarama Tasikmalaya

Keterangan :

1. Kepala Kantor Bertugas Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data, bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e – SPT dan e – Filling, dan penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan, bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Penagihan, bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisa kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (Sugiono, 2016:9). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari narasumber (Sugiono, 2016:225).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh penulis dari studi *literature* yang berupa buku, penelitian yang sudah ada, jurnal dan internet yang berhubungan dengan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sugiono, 2016:225).

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi langsung yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai *literature* dan sumber bacaan yang berhubungan dengan prosedur penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016:291).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:310).

3. Observasi Langsung

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2016:310) .

3.2.3. Teknik Analisa Data

Dalam proses analisis data ini dibagi menjadi beberapa proses yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan (Sugiyono, 2016:308).

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2016:249). Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Pada penelitian ini penulis berdiskusi atau melakukan wawancara dengan pembimbing magang dan juga pegawai di KPP Pratama Tasikmalaya.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan *flowchart* (Sugiyono, 2016:249). Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data dengan ketiga bentuk tersebut, mengenai prosedur penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti jadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016:252). Setelah data disajikan data akan ditarik kesimpulan oleh penulis mengenai topik yang telah dibahas yaitu prosedur penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap.